

Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Biak Numfor Distrik Biak Timur Kampung Soryar

Michi Lussy¹, Rochmad Bayu Utomo²

Faculty of Economics, University of Mercu Buana Yogyakarta^{1,2}

ARTICLE INFO

Keywords:

Transparency, Accountability, Community Participation, Village Fund Management

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of transparency, accountability, and community participation on the management of village funds in Soryar Village, East Biak District, Biak Numfor. This type of qualitative research uses primary data by distributing questionnaires to respondents. The population in this study were all people who lived in Soryar Village, East Biak District, Biak Numfor Regency. The method used is purposive sampling so as to get 60 respondents but use 30 people outside the same district and sub-district. Based on the results of the t test that has been carried out to find out, that transparency and accountability have no significant effect on the management of village funds. Meanwhile, community participation is proven to have a significant effect on the management of village funds.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Corresponding Author:

Michi Lussy
University of Mercu Buana Yogyakarta
Email: michilussy@gmail.com

Pendahuluan

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau dengan keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama. Terdapat 38 provinsi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, termasuk beberapa provinsi terbaru yang merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua, yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022. Salah satu program pemerintah adalah pemberian dana desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Tujuan pemberian dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan mengurangi kemiskinan di desa melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dana desa bersumber dari APBN dan digunakan untuk membiayai pembangunan serta pembinaan masyarakat. Salah satu provinsi yang menerima dana desa adalah Provinsi Papua,

yang terdiri dari beberapa kabupaten, antara lain Kabupaten Jayapura, Sarmi, Keerom, Mamberamo Jaya, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan Supiori. Di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di Distrik Biak Timur, terdapat Kampung Soryar. Menurut Sirri (2024), dua puluh kampung di Biak mengalami keterlambatan pencairan dana desa karena belum melengkapi persyaratan, termasuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya. Penting untuk mengelola dana desa dengan akuntabilitas dan transparansi guna mengurangi polemik di masyarakat. Pengelolaan dana desa diawasi oleh Tim 7 yang dibentuk oleh pemerintah pusat, terdiri dari tujuh anggota yang mencakup tokoh adat, pemerintah kampung, tokoh pemuda, perempuan, gereja, masyarakat, dan Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Namun, terdapat masalah terkait kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, penggunaan dana yang tidak sesuai program, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana tersebut (Permadi, P. A. 2020).

Transparansi dalam pengelolaan dana desa adalah aspek penting untuk menciptakan tata kelola yang baik dan mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan. Dengan menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan transparansi, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat, mencegah penyalahgunaan dana, dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan dana. Namun, penelitian menunjukkan bahwa transparansi tidak selalu berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian (Siregar, 2020) yang menemukan transparansi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Yanti, et.al, 2023) menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Akuntabilitas adalah kewajiban individu, kelompok, atau organisasi untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas menjadi topik penting dalam desentralisasi dan tata kelola pemerintahan desa di Indonesia. Pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat mendorong pembangunan yang efektif dan efisien, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak selalu berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hasil penelitian (Wahyu Aditya & Widaryanti 2022) yang menunjukkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Sementara hasil penelitian Edi Yanto & (Aqfir Aqfir 2020) yang menyatakan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Sedangkan, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa melibatkan keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana. Ini mencakup pembentukan forum atau mekanisme partisipatif, seperti musyawarah desa, untuk mendiskusikan kebutuhan dan alokasi dana sesuai aspirasi masyarakat setempat. Partisipasi yang kuat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program pembangunan desa, sehingga keputusan alokasi dana mencerminkan kebutuhan lokal. Hasil penelitian (Hulu & Rahim 2022) yang menunjukkan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Berbeda dari hasil penelitian (Setyawati, 2022) yang menunjukkan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dan desa.

Kajian Teory

Teory Keagenan (Agency Theory)

Teori Keagenan muncul dari adanya hubungan antara agen dan principal, dan di pemerintah daerah, penerapannya mulai terlihat sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999. Dalam pengelolaan dana desa, masyarakat berperan sebagai principal, sementara pemerintah desa bertindak sebagai agen. Menurut Supriyono (2018), hubungan ini seharusnya bersifat kontraktual, di mana masyarakat memberi wewenang kepada pemerintah desa untuk membuat keputusan yang terbaik, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan manfaat bagi mereka. Dengan adanya hubungan ini, masyarakat dapat lebih aktif mengawasi

dan terlibat dalam pengelolaan dana desa, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. Oleh karena itu, penerapan teori keagenan dalam pengelolaan dana desa diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, sehingga tujuan pembangunan desa dapat tercapai dengan baik. Selain itu, kerjasama yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat akan mendorong pembangunan yang lebih merata dan memberdayakan, sehingga semua pihak dapat merasakan manfaatnya.

Pengaruh transparansi terhadap pengelolaan dana desa

Transparansi merupakan aspek krusial dalam pengelolaan dana desa, karena semakin tinggi tingkat transparansi, semakin efektif pengelolaan tersebut. Keterbukaan dalam informasi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pengawasan. Dengan adanya informasi yang jelas dan dapat diakses, masyarakat dapat memberikan masukan yang konstruktif serta menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah desa. Transparansi mencerminkan keterbukaan pemerintah serta tanggung jawab terhadap semua kegiatan yang dilakukan, sejalan dengan teori keagenan yang menunjukkan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Dengan transparansi yang tinggi, prinsipal dapat mengakses informasi yang lebih lengkap, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam pembangunan desa (Edi Yanto & Aqfir, 2020).

H1: Transparansi berpengaruh positif terhadap Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh Akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa

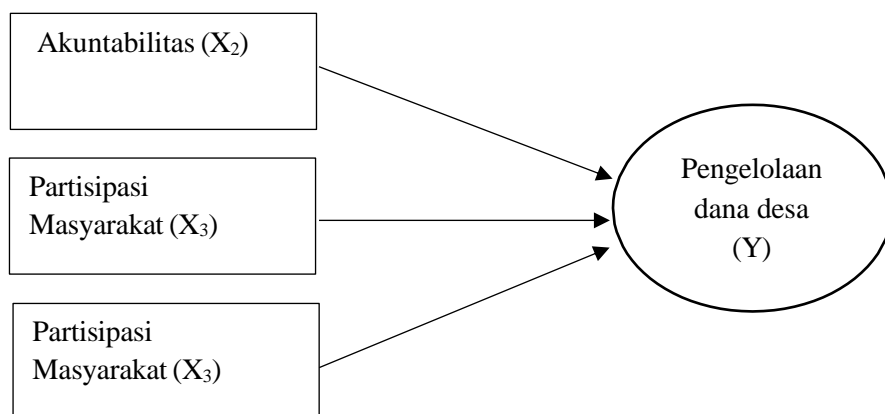
Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan hal ini sangat penting dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Dalam konteks desentralisasi, akuntabilitas memastikan bahwa pemerintah desa, sebagai agen, menjalankan tugasnya dengan baik sesuai harapan masyarakat sebagai prinsipal. Teori keagenan menunjukkan bahwa ada kemungkinan informasi yang tidak seimbang antara keduanya, sehingga akuntabilitas yang baik membantu mengatasi masalah ini. Dengan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat, pembangunan desa bisa lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian oleh Garung & Ga (2020) menegaskan bahwa akuntabilitas memiliki pengaruh besar terhadap pengelolaan dana desa, menunjukkan bahwa dengan akuntabilitas yang kuat, masyarakat akan lebih percaya dan terlibat dalam pembangunan desa.

H2 : Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.

Partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan Dana Desa

Dana Desa adalah aspek penting untuk mewujudkan pembangunan desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, pemberdayaan, dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks teori keagenan, di mana ada kemungkinan informasi yang tidak seimbang antara pemerintah desa sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal, partisipasi masyarakat yang aktif menjadi sangat penting. Dengan keterlibatan masyarakat, Dana Desa bisa menjadi alat yang efektif untuk mendorong pembangunan yang berkualitas, meningkatkan kesejahteraan, dan mewujudkan desa yang mandiri. Penelitian oleh Maji et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh besar terhadap pengelolaan dana desa, menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

H3 : Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan populasi seluruh masyarakat yang menetap di kampung Soryar distrik Biak timur Kabupaten Biak Numfor, dalam penelitian ini terdapat satu variabel dependen yaitu pengelolaan dana desa dan menggunakan tiga variabel independen yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh dari hasil kuesioner yang dibagikan. Untuk menentukan sampel peneliti menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 60 orang tetapi menggunakan 30 orang di luar kabupaten dan kecamatan yang sama. Agar dapat digunakan untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut ini adalah definisi operasional variabel dalam penelitian ini :

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Pengelolaan Dana Desa (Y)	Tahap perencanaan Tahap pelaksanaan Tahap penatausahaan Tahap pelaporan (PP No. 113 Tahun 2014)
Transparansi (X1)	Kesediaan dan aksesibilitas dokumen Kejelasan dan kelengkapan informasi Keterbatasan proses Kerangka regulasi yang menjamin transparansi (Kristianten)
Akuntabilitas (X2)	Adanya laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota Adanya laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota Adanya laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada akhir tahun anggaran Adanya informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat setiap akhir tahun anggaran. (Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa)

Partisipasi Masyarakat (X3)	Keterlibatan masyarakat pengelolaan dana desa. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Adanya pengawasan dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam penerimaan manfaat program pemberdayaan masyarakat dari dana desa.
-----------------------------	--

(Dewi, 2019)

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Uji Validitas Variabel Transparasi

Item pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Rtabel (N=58) Sig. 0,05	Keterangan
X1.1	0,914	0,254	Valid
X1.2	0,934	0,254	Valid
X1.3	0,880	0,254	Valid
X1.4	0,753	0,254	Valid

Tabel 3. Uji Validitas Variabel Akuntabilitas

Item pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Rtabel (N=58) Sig. 0,05	Keterangan
X2.1	0,811	0,254	Valid
X2.2	0,867	0,254	Valid
X2.3	0,854	0,254	Valid
X2.4	0,807	0,254	Valid

Tabel 4. Uji Validitas Variabel Partisipasi Masyarakat

Item pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Rtabel (N=58) Sig. 0,05	Keterangan
X3.1	0,773	0,254	Valid
X3.2	0,732	0,254	Valid
X3.3	0,779	0,254	Valid
X3.4	0,831	0,254	Valid

Tabel 5. Uji Validitas Variabel Pengelolaan Dana Desa

Item pertanyaan	<i>Pearson Correlation</i>	Rtabel (N=58) Sig. 0,05	Keterangan
Y1	0,779	0,254	Valid
Y2	0,876	0,254	Valid
Y3	0,878	0,254	Valid
Y4	0,761	0,254	Valid

Berdasarkan tabel 2, 3, 4 dan 5 diatas dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan dari 4 variabel dikatakan valid, karena semua nilai Rhitung (Person Correlation) lebih besar dari Rtabel. Dimana nilai N= 58 an nilai signifikan 0,05 sebesar 0,254 maka dapat diketahui semua pernyataan valid.

Tabel 6. Uji Reliabilitas Item-item Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	N of items
Transparasi	0.889	Reliabel
Akuntabilitas	0.861	Reliabel
Partisipasi Masyarakat	0.784	Reliabel
Pengelolaan Dana Desa	0.843	Reliabel

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan pengelolaan dana desa > 0,6. Oleh karena itu, hasil tersebut menunjukkan bahwa kuesioner tersebut dikatakan reliabel.

Tabel 7. Uji Normalitas (Kolmogorov Smurmov)

<i>Unstandardized Residual</i>		
N		60
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	0.000000
	<i>Std. Deviation</i>	1.76345567
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Extreme Absolute Positive</i>	0,151
	<i>Extreme Absolute Negative</i>	0,151
	<i>Negative</i>	-0,093
<i>Test Statistic</i>		0,128
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,113 ^{c,d}

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,113 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas
Collinearity

Variabel	<i>Statistics</i>	
	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
Transparansi	0,642	1.558
Akuntabilitas	0,450	2.223
Partisipasi Masyarakat	0,622	1.607

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai VIF pada variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat lebih besar dari 10, sedangkan nilai tolerance variabel transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat kurang dari 0,10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independent.

Uji Hipotesi

Tabel 9. Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	Koefisien	t	Sig.
<i>(Constant)</i>	1,701	1.161	0,251
Transparansi	0,080	1.034	0,306
Akuntabilitas	0,259	1.976	0,053
Partisipasi Masyarakat	0,607	5.013	0,000

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1.TR + \beta_2.AK + \beta_3.PM + e$$

$$Y = 1,701 + 0,080TR + 0,259Ak + 0,607PM$$

Tabel 10. Uji *t*

Variabel	t hitung	t tabel	Sig.	Keterangan
Transparansi	1,034	1,67252	0,306	Tidak Berpengaruh
Akuntabilitas	1,976	1,67252	0,053	Tidak Berpengaruh
Partisipasi Masyarakat	5.013	1,67252	0,000	Berpengaruh

Berdasarkan table diatas dapat di simpulkan bahwa variabel transparansi (X1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,306 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1.034 < 1,67252$, sehingga H1 ditolak artinya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana

desa. Selain itu, variabel akuntabilitas (X2) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,053 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $1,976 < 1,67252$, sehingga H2 ditolak artinya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Sedangkan, variabel partisipasi (X3) menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,013 < 1,67252$, sehingga H3 diterima artinya partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa.

Pembahasan

1. Hubungan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa (H1)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel transparansi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di Distrik Biak Timur Kampung Soryar. Hal ini disebabkan oleh ketidakterediaan papan informasi terbaru dari pemerintah desa secara berkala. Akibatnya, banyak masyarakat di kampung tersebut yang kurang memahami situasi pengelolaan dana desa. Mereka tidak dapat mengawasi apakah pengelolaan dana desa sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak. Transparansi sangat penting dalam pengelolaan dana desa, karena masyarakat perlu tahu bagaimana dana tersebut digunakan dan apa saja kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun, tanpa informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan secara efektif. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sukmawati & Nurfitriani (2019), yang menyatakan bahwa masyarakat kesulitan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa dengan baik karena kurangnya media informasi yang tersedia. Kurangnya akses informasi ini membuat masyarakat tidak tahu perkembangan dan penggunaan dana desa. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan penyediaan informasi yang tepat waktu sangat penting agar masyarakat dapat mengawasi dan memahami pengelolaan dana desa dengan lebih baik. Dengan informasi yang jelas dan mudah diakses, masyarakat bisa berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan serta memberikan masukan yang membangun, sehingga kepercayaan terhadap pengelolaan dana desa dapat terjaga.

2. Hubungan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Dana Desa (H2)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Biak Numfor, khususnya di Distrik Biak Timur Kampung Soryar. Ketidakterdayaan ini disebabkan oleh kurangnya pertanggungjawaban dari perangkat desa dalam mengelola anggaran. Salah satu masalah utama adalah kurangnya informasi yang jelas mengenai pelaksanaan anggaran pemerintah desa. Masyarakat tidak mendapatkan laporan yang memadai tentang bagaimana dana desa digunakan. Selain itu, sering terjadi perubahan dalam program yang telah direncanakan, dan dana kampung tidak digunakan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Situasi ini membuat masyarakat sulit untuk mengetahui apakah dana desa dikelola dengan baik atau tidak. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Edi Yanto & Aqfir Aqfir (2020), yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa kurang baik, disebabkan oleh laporan keuangan yang tidak sesuai dan tidak tepat waktu. Ketidaktepatan dalam laporan tersebut menyulitkan masyarakat untuk mengawasi dan memahami penggunaan dana desa secara efektif. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana dan berdampak negatif pada partisipasi mereka dalam proses pembangunan desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan waktu dalam penyajian laporan keuangan agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa.

3. Hubungan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana desa (H3)

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini terjadi karena masyarakat di Kampung Soryar terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa. Keterlibatan ini penting agar masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka terkait penggunaan dana desa. Selain itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tim 7 juga berperan sebagai wakil masyarakat. Mereka berfungsi untuk mengkomunikasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah desa, sehingga pengelolaan dana desa dapat lebih sesuai dengan harapan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Angelia, et.al (2020), yang menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang baik tentang pembangunan desa dan akses informasi mengenai dana desa. Ketika masyarakat berpartisipasi secara aktif, pengelolaan dana desa menjadi lebih transparan dan efektif. Partisipasi ini tidak hanya membantu masyarakat memahami bagaimana dana digunakan, tetapi juga mendorong perangkat desa untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Dengan demikian, hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang sukses.

Kesimpulan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat sangatlah penting. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas juga perlu ditingkatkan agar pengelolaan dana dapat memberikan hasil yang lebih baik. Peneliti menyarankan agar transparansi dalam pengelolaan dana desa diperkuat dengan menerbitkan laporan secara rutin dan menyediakan papan informasi, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan. Dengan adanya informasi yang jelas dan terbuka, masyarakat akan lebih percaya dan terlibat aktif dalam pengawasan penggunaan dana desa. Pemerintah desa juga perlu meningkatkan pengetahuannya dalam menyusun laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan program yang ada dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pelatihan dan bimbingan bagi pengelola dana desa dapat membantu memperbaiki kualitas laporan agar masyarakat dapat lebih memahami dan terlibat dalam proses ini. Dengan langkah-langkah ini, pengelolaan dana desa yang diselenggarakan dapat menjadi lebih efektif dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, serta mendorong terciptanya desa yang lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

- [1] Aditya, W., & Widaryanti, W. (2022). ANALISIS PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN
- [2] ALOKASI DANA DESA. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis & Akuntansi (EMBA)*, 1(1), 43-48.
- [3] Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19-27.
- [4] Hulu, F., & Rahim, R. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Hilina'a Kecamatan Gunungsitoli. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2312-2320.

- [5] Jaa, E., Sulisty, S., & Setiyowati, S. W. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 7(1).
- [6] Olivia, C. R. (2023). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, PERAN DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLA DANA DESA (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- [7] Permadi, P. A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Jenarlor, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2018 (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- [8] Putri, A. R. L. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(Special Issue 3), 1668-1688.
- [9] Sarah, W. M. (2020). Pengaruh Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman) (Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Yogyakarta).
- [10] Setyawati, E. S. (2022). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Kecamatan Reban Kabupaten Batang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- [11] Siregar, M. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa terhadap pembangunan desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat). *Jurnal Ilmiah Kohesi*, 4(2), 59-59.
- [12] Sitienei, J., Manderson, L., & Nangami, M. (2021). Community participation in the collaborative governance of primary health care facilities, Uasin Gishu County, Kenya. *PloS one*, 16(3), e0248914.
- [13] Watu, D., Londa, Y., & Sayang, S. (2023). PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGAWASAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi*, 4(2), 107-118.
- [14] Yanti, E. R., Wiralestari, W., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh). *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 12(01), 53-64.
- [15] Yanto, E., & Aqfir, A. (2020). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E- DJ)*, 2(2).